

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Liberty, Yogyakarta, hal.3

Fenny r. wolaya rahmawaty hadju meity R.imbar. kimia organic(*tata nama, struktur dan fungsi*). Cv patra media grafindo bandung, 2022
Hlm 9

Kamal Hidjaz, *“Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia”* Pustaka Refleksi. Makasar. 2010.

Muhammad Fauzan, *“Hukum Pemerintahan Daerah”* ,(Yogyakarta:UIN Press, 2006).

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *“Penelitian Hukum”*, Cet. XII, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ridwan HR *“Hukum Administrasi Negara”*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013.

Ramlan Subakti, *“Memahami Ilmu Politik”* (Jakarta:PTGramedia, 2001), hlm. 57. Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006).

Soejito, I, Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah. Kudus: PT Rineka Cipta, 1990, Hlm. 54.

Soedjono Dirjosisworo, 1984. Alkoholisme, Paparan Hukum Dan Kriminologi, Remaja Karya, Bandung, h. 111

Yusuf Qardhawi, 2000. Halal Dan Haram, Cet. 1. PT bina Ilmu, Surabaya, hlm. 89

JURNAL:

Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah” Fakultas Hukum Unpad. Bandung, 2000.

Candra Priangguna “Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya”

- Chairil A. Adjis, “Alkohol, TKI, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional,” Vol. 4 No 1, September 2005, hal. 78. Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA, 2015, Vol.05, No.1.
- Fachrizza Sidi Pratama “Fenomena Rechtsvacuum Dalam Peraturan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 terkait Masa Perpanjangan Paspor menjadi 10 Tahun”, Politeknik Imigrasi, 2019, Vol.1 No.1
- Harris Y.P, 2016, “Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol”, Vol.7 No.1, Hlm.133
- Hasaziduhu Moho “Penegakan Hukum di Indonesia menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemasyarakatan” Universitas Dharmawangsa, 2019.
- I Wayan Suandi, “Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana, 2010, Vol.1 No. 01.
- Luffita Affianti “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Berarkohol Tradisional” Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2018, Vol.33, No.1.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 47 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Perdagangan terhadap pengadaan dan penjualan minuman beralkohol
- Peraturan Presiden no.74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2018 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol..

Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

SKRIPSI

Skripsi Nur Faridah “Analisis Saddu Al-Dhari’ah terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol” Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri Ponorogo, 2018.

INTERNET

<https://www.bangsaonline.com/berita/123305/anggota-dprd-jember-dan-polisi-sidak-toko-yang-jual-minuman-keras-di-jalan-sumatra> diakses pada 20 Juni pukul 22.55 WIB

